



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgia.v4i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 13 Oktober 2026 | Revised: 17 Oktober 2026 | Accepted: 18 Oktober 2026

Inisiasi dan Rencana Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa guna Meningkatkan Kinerja (Studi Kasus di Desa Tanjung Agung)

M. Zainal Aldiansyah¹, Tiris Sudrartono²

¹Politeknik Piksi Ganesha, Bandung, Indonesia, enalz476@gmail.com.

²Politeknik Piksi Ganesha, Bandung, Indonesia, tiris.sudrartono@gmail.com.

Corresponding Author: enalz476@gmail.com¹

Abstract: Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village-based economic institutions established to improve community welfare through the independent and sustainable management of local resources. This study aims to analyse the process of establishing the Tanjung Agung Sejahtera BUMDes, identify the constraints faced in its management, and formulate empowerment strategies to improve the organisation's performance. The study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and a review of documents from BUMDes management, the village government, and the community. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman interactive model, which comprises data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that the Tanjung Agung Sejahtera Village-Owned Enterprise (BUMDes) has established a sound institutional foundation through the formation of an organisational structure, the drafting of the Articles of Association and By-laws (AD/ART), and the appointment of the management board. However, the organisation's performance has not yet been optimal due to the failure to secure village capital contributions, which has resulted in business units not yet being operational, low levels of operational activity, and sub-optimal administrative and financial management systems. The recommended empowerment strategies include strengthening capital, enhancing human resource capacity, implementing professional organisational governance, utilising information technology, and developing business units based on local potential. It is hoped that the implementation of these strategies will improve the performance of BUMDes and promote the sustainable well-being of the community.

Keyword: BUMDes, Initiatives, Empowerment, Organisational Performance, Village Development.

Abstrak: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses inisiasi pembentukan BUMDes Tanjung Agung Sejahtera, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, serta merumuskan strategi pemberdayaan guna meningkatkan kinerja

organisasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi terhadap pengurus BUMDes, pemerintah desa, serta masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Tanjung Agung Sejahtera telah memiliki fondasi kelembagaan yang cukup baik melalui pembentukan struktur organisasi, penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta penetapan pengurus. Namun, kinerja organisasi belum berjalan optimal akibat belum terealisasinya penyertaan modal desa yang berdampak pada belum berjalannya unit usaha, rendahnya aktivitas operasional, serta belum optimalnya sistem administrasi dan pengelolaan keuangan. Strategi pemberdayaan yang direkomendasikan meliputi penguatan permodalan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan tata kelola organisasi yang profesional, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan unit usaha berbasis potensi lokal. Implementasi strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMDes dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: BUMDes, Inisiasi, Pemberdayaan, Kinerja Organisasi, Pengembangan Desa.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis yang dibentuk untuk mendorong kemandirian ekonomi desa dengan mengoptimalkan potensi lokal dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Eksistensi dan kedudukan hukum BUMDes saat ini semakin kuat sejalan dengan amanat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menegaskan status BUMDes sebagai badan hukum (Peraturan Pemerintah, 2021). Saat ini, peran BUMDes telah berkembang tidak hanya sebagai lembaga pencari laba (*profit oriented*), tetapi juga memiliki dimensi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. Namun, secara nasional, perkembangan BUMDes masih menghadapi tantangan besar, terutama pada aspek manajerial dan pemahaman peluang pasar yang masih rendah. (Saiman & Hariyati, 2022) menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan BUMDes sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sistem organisasi yang digunakan.

Eksistensi BUMDes diharapkan menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Desa (PADesa) dengan target kontribusi sebesar 25% dari hasil usaha bersih. Potensi ini terlihat nyata pada rencana kerja BUMDes Tanjung Agung Sejahtera yang memproyeksikan cakupan usaha di tujuh sektor strategis, mulai dari perdagangan, pertanian, peternakan, jasa, hingga sektor industri dan pariwisata. Namun, luasnya cakupan bidang usaha ini justru menjadi tantangan tersendiri apabila tidak dibarengi dengan inisiasi manajemen yang kuat. Kegagalan dalam mengelola keragaman unit usaha ini di tahap awal tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga hilangnya kesempatan desa untuk mengoptimalkan kekayaan sumber daya lokal yang seharusnya mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara masif (Akbar et al., 2022).

Dalam mengevaluasi keberhasilan sebuah organisasi, kinerja menjadi tolak ukur utama. Namun, penilaian kinerja BUMDes tidak boleh hanya terpaku pada aspek keuangan saja. (Anggraini, 2025) menyatakan bahwa kemampuan BUMDes harus dinilai secara komprehensif melalui sudut pandang ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Guna mencapai kinerja yang optimal, diperlukan pengelolaan SDM yang profesional, salah satunya melalui penerapan sistem pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) yang bertujuan untuk membangun disiplin serta tanggung jawab pengelola.

Di era transformasi bisnis digital, kinerja BUMDes juga sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data keuangan. Sebagai entitas yang berbadan hukum, BUMDes dituntut untuk mampu menyajikan laporan yang kredibel guna menjaga kepercayaan publik dan pemerintah desa. Penggunaan instrumen akuntansi berbasis teknologi seharusnya menjadi standar dalam meminimalisir risiko kesalahan manusia (*human error*) dan manipulasi data. Akan tetapi, adopsi sistem digital ini seringkali terhambat oleh ketiadaan modal awal untuk pengadaan perangkat pendukung dan pelatihan SDM. Tanpa adanya dukungan finansial untuk membangun sistem informasi akuntansi yang terstruktur, pengelola akan kesulitan dalam memantau pertumbuhan aset dan melakukan evaluasi kinerja secara objektif.

Secara teoretis, siklus hidup sebuah organisasi dimulai dari tahap inisiasi. Menurut Yuliani et al. (2025), inisiasi merupakan langkah awal yang menentukan dasar hukum, struktur, dan arah strategis organisasi. Proses ini harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan. Menurut Siregar (2023), pemberdayaan adalah upaya memberikan sumber daya, kesempatan, dan pengetahuan agar subjek dapat mandiri secara berkelanjutan. Pentingnya fase awal ini juga ditekankan oleh (Sabon et al., 2024), yang menyebutkan bahwa keberlanjutan BUMDes sangat ditentukan oleh tingkat kesiapan kelembagaan dan strategi pengelolaan yang dipersiapkan sejak awal pembentukan.

Dari aspek kelembagaan, kematangan sebuah organisasi dapat diukur dari kelengkapan struktur dan pembagian wewenang yang jelas. BUMDes Tanjung Agung Sejahtera sebenarnya telah memiliki kesiapan administratif yang memadai dengan terbentuknya organ organisasi yang lengkap, mulai dari Penasihat, Pelaksana Operasional (Direktur, Sekretaris, Bendahara), hingga Dewan Pengawas yang melibatkan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ketua RT. Secara regulasi, para pengurus ini telah diberikan mandat melalui Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 untuk mengelola aset dan menjalankan investasi desa. Kesiapan struktural ini seharusnya menjadi modal sosial yang kuat; namun, struktur yang sudah mapan tersebut menjadi tidak berdaya fungsi ketika instrumen pendukung operasional, terutama modal kerja, tidak tersedia di lapangan.

Kondisi tersebut sangat relevan dengan situasi di BUMDes Tanjung Agung Sejahtera di Desa Tanjung Agung. Organisasi ini telah berdiri sekitar 1 tahun 6 bulan sejak dibentuknya pada , namun hingga kini masih mengalami hambatan serius dalam hal permodalan. Berdasarkan Anggaran Dasar BUMDes Bab V Pasal 25, Pemerintah Desa sejatinya telah merencanakan penyertaan modal dari APBDesa tahun 2025 sebesar Rp 350.000.000. Namun, realisasi di lapangan masih menunjukkan

Angka nihil. Kesenjangan antara rencana dan kondisi riil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Rencana Anggaran dan Realisasi BUMDes Tanjung Agung Sejahtera (Tahun 2025)

No	Kegiatan / Aktivitas	Estimasi Kebutuhan / Jumlah	Sumber Dana	Realisasi	Keterangan
1	Penyertaan Modal Awal	Rp 350.000.000	APBDesa 2025	Rp 0	Belum direalisasikan
2	Gaji Pegawai / Operasional	Rp 12.000.000	Kas BUMDes	Rp 0	Belum terealisasi
3	Inisiasi Unit Usaha	Menyesuaikan Modal	Kas BUMDes	Rp 0	Belum berjalan

Sumber : AD BUMDes Tanjung Agung Sejahtera

Ketiadaan dukungan modal ini menjadi akar permasalahan yang mengganggu jalannya operasional, sehingga usaha yang diproyeksikan dalam AD/ART belum dapat berjalan baik. Selain itu, kondisi ini berdampak pada rendahnya inovasi usaha serta terhambatnya sistem manajemen internal, seperti belum adanya pengukuran kinerja terstruktur dan tidak berjalannya

mekanisme *reward* maupun *punishment* secara konsisten. Tanpa rencana pemberdayaan yang terarah sejak fase awal, BUMDes berpotensi mengalami stagnasi dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga ekonomi desa (Saputra & Samsahudi, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai BUMDes, seperti yang dilakukan oleh (Musyayadah et al., 2024) dan (Umar et al., 2025), lebih banyak berfokus pada evaluasi kinerja dan strategi pemasaran BUMDes yang telah mapan dan beroperasi secara aktif. Kajian mengenai strategi tata kelola dan pemberdayaan BUMDes yang masih berada pada tahap inisiasi, terutama yang mengalami kendala ekstrem pada ketiadaan modal awal, masih sangat terbatas. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai integrasi proses inisiasi pembentukan BUMDes dengan penguatan manajemen SDM dalam kondisi keterbatasan modal. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis terintegrasi antara fase inisiasi dengan perancangan strategi pemberdayaan yang adaptif di tengah absennya dukungan permodalan. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis bagi pengelola BUMDes Tanjung Agung Sejahtera serta menjadi referensi praktis bagi pemerintah desa dalam meningkatkan keberlanjutan usaha (Sutrisno et al., 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif menurut Sugiyono (2020) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Sedangkan metode deskriptif menurut Miles et al. (2019) adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata. Jadi, metode kualitatif deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami secara mendalam fenomena yang terjadi pada objek penelitian secara alamiah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di BUMDes "Tanjung Agung Sejahtera", Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara selama kurun waktu enam bulan (Januari hingga Juni 2026), dengan intensitas observasi lapangan sebanyak dua hingga tiga kali dalam seminggu. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan kunci yang diwawancarai berjumlah 5 orang, meliputi Kepala Desa selaku Penasihat (1 orang), Direktur BUMDes (1 orang), jajaran pengurus yaitu Sekretaris (1 orang) dan Bendahara (1 orang), serta perwakilan masyarakat desa (1 orang).

Selanjutnya, untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi fisik dan kegiatan operasional BUMDes. Sementara itu, wawancara dilakukan dengan teknik semi-terstruktur agar dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan fleksibel dari para informan. Selain itu, dilakukan juga studi dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder berupa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), struktur organisasi, dan dokumen pendukung lainnya.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data (memilih dan memfokuskan data yang relevan), penyajian data (menyusun narasi deskriptif yang sistematis), dan penarikan kesimpulan. Guna menjamin keabsahan dan tingkat kepercayaan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber yang berbeda serta melakukan pengecekan ulang terhadap kondisi riil di lapangan (Wulandari & Lestari, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inisiasi Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Tanjung Agung Sejahtera

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, BUMDes Tanjung Agung Sejahtera dibentuk sebagai upaya Pemerintah Desa Tanjung Agung dalam mengoptimalkan potensi ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara kelembagaan, BUMDes telah memiliki struktur organisasi yang terdiri atas penasihat, direktur, sekretaris, bendahara, dan dewan pengawas. Selain itu, organisasi juga telah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan operasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses inisiasi pembentukan BUMDes telah dilaksanakan dengan baik dari aspek administratif dan kelembagaan. Hal ini dibuktikan dengan kelengkapan dokumen legalitas melalui pengesahan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 serta tersusunnya AD/ART secara komprehensif pada awal masa pembentukan. Namun, pelaksanaan program kerja dan pengembangan unit usaha belum berjalan secara optimal karena belum adanya dukungan sumber daya yang memadai, khususnya dalam aspek permodalan.

Kendala Pengelolaan BUMDes dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi BUMDes Tanjung Agung Sejahtera adalah belum terealisasinya penyertaan modal dari Pemerintah Desa sebesar Rp 350.000.000 sebagaimana telah direncanakan. Kondisi tersebut menyebabkan unit usaha yang telah direncanakan belum dapat dijalankan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Direktur BUMDes (Wawancara, 15 April 2026) yang mengungkapkan, "Karena belum turunnya dana penyertaan modal dari desa, kami sangat kesulitan untuk memulai unit usaha yang sudah direncanakan di AD/ART, sehingga aktivitas operasional saat ini terpaksa belum bisa berjalan."

Selain itu, pengelolaan administrasi dan keuangan masih dilakukan secara sederhana dan belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Keterbatasan tersebut berdampak pada belum maksimalnya proses pelaporan, pengawasan, dan evaluasi kinerja organisasi. Penelitian juga menemukan bahwa belum adanya insentif bagi pengurus menyebabkan aktivitas pengelolaan BUMDes masih dilakukan secara sukarela sehingga intensitas kegiatan organisasi menjadi terbatas.

Rencana Pemberdayaan BUMDes Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa strategi pemberdayaan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja BUMDes. Strategi tersebut meliputi penguatan permodalan melalui realisasi penyertaan modal desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan, penguatan tata kelola organisasi melalui penerapan sistem administrasi yang lebih baik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan organisasi.

Selain itu, pengembangan unit usaha yang sesuai dengan potensi lokal Desa Tanjung Agung juga menjadi salah satu strategi penting yang dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi. Pengembangan usaha berbasis potensi lokal dinilai memiliki peluang yang lebih besar untuk berhasil karena sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Peran BUMDes dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum dapat berjalan secara optimal karena unit usaha yang direncanakan masih belum beroperasi. Meskipun demikian, masyarakat masih memiliki harapan yang besar terhadap keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang mampu membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Apabila strategi pemberdayaan dapat direalisasikan secara bertahap, BUMDes berpotensi menjadi

motor penggerak ekonomi desa yang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pembahasan

Hasil dari pada penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Tanjung Agung Sejahtera telah memiliki fondasi kelembagaan yang cukup baik melalui pembentukan struktur organisasi, penyusunan AD/ART, serta penetapan pengurus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses inisiasi pembentukan BUMDes telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan ini mendukung pendapat Yuliani dkk. (2025) yang menyatakan bahwa tahap inisiasi merupakan fondasi awal yang menentukan arah dan keberlanjutan suatu organisasi.

Meskipun demikian, kesiapan kelembagaan yang telah terbentuk belum mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menghambat perkembangan BUMDes adalah belum terealisasinya penyertaan modal dari pemerintah desa. Keterbatasan modal menyebabkan berbagai program kerja dan unit usaha yang telah direncanakan tidak dapat dijalankan. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Akbar dkk. (2022) yang menyatakan bahwa permodalan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pengembangan BUMDes.

Selain aspek permodalan, penelitian ini juga menemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan sistem tata kelola organisasi masih perlu diperkuat. Pengelolaan administrasi dan keuangan yang masih dilakukan secara sederhana menyebabkan proses pelaporan dan evaluasi kinerja belum berjalan secara efektif. Dalam konteks transformasi digital, kondisi ini menunjukkan perlunya penerapan sistem administrasi berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Temuan tersebut mendukung penelitian Wulandari dan Lestari (2024) yang menegaskan bahwa digitalisasi tata kelola menjadi salah satu kebutuhan utama dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan temuan penelitian, peningkatan kinerja BUMDes tidak hanya bergantung pada ketersediaan modal, tetapi juga memerlukan strategi pemberdayaan yang terintegrasi. Penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi pengurus, penerapan tata kelola yang profesional, serta pengembangan unit usaha berbasis potensi lokal merupakan langkah yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Melalui strategi tersebut, BUMDes memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang sebagai lembaga ekonomi desa yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Tanjung Agung Sejahtera telah memiliki fondasi kelembagaan yang cukup baik melalui pembentukan struktur organisasi, penyusunan AD/ART, dan penetapan pengurus. Namun, kesiapan kelembagaan tersebut belum mampu meningkatkan kinerja organisasi secara optimal karena belum didukung oleh sumber daya yang memadai, terutama dalam aspek permodalan.

Keterbatasan modal usaha menjadi faktor utama yang menyebabkan belum berjalannya unit usaha, rendahnya aktivitas operasional organisasi, serta belum optimalnya pengelolaan administrasi dan keuangan. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dan sistem tata kelola organisasi masih memerlukan penguatan agar mampu mendukung pengelolaan BUMDes secara profesional.

Peningkatan kinerja BUMDes Tanjung Agung Sejahtera memerlukan strategi pemberdayaan yang meliputi realisasi penyertaan modal desa, peningkatan kompetensi pengurus, penguatan tata kelola organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan unit usaha yang berbasis pada potensi lokal. Keberhasilan strategi tersebut

sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan organisasi.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil temuan. Pertama, fokus kajian penelitian ini terbatas pada fase inisiasi pembentukan dan perencanaan pemberdayaan kelembagaan. Hal ini dikarenakan unit-unit usaha BUMDes Tanjung Agung Sejahtera belum dapat beroperasi secara nyata di lapangan akibat terkendala ketiadaan modal awal. Kedua, evaluasi kinerja BUMDes dalam penelitian ini belum dapat diukur secara komprehensif berdasarkan indikator finansial (seperti laporan laba/rugi, perputaran aset, atau tingkat kontribusi terhadap PADes), melainkan baru berfokus pada evaluasi kesiapan administratif dan struktural pengurus. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang diharapkan dapat melengkapi keterbatasan ini dengan melakukan pengukuran kinerja secara menyeluruh apabila BUMDes telah beroperasi secara penuh.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan kinerja BUMDes Tanjung Agung Sejahtera perlu dilakukan melalui penguatan permodalan, peningkatan kapasitas pengurus, dan pembenahan tata kelola organisasi secara bertahap. Pemerintah Desa disarankan merealisasikan dukungan permodalan sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan desa, sedangkan pengurus BUMDes perlu meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan administrasi, keuangan, pemasaran, dan pengembangan usaha. Pemanfaatan teknologi informasi juga perlu mulai diterapkan untuk mendukung pencatatan, pelaporan, transparansi, dan pengawasan kegiatan BUMDes. Pengembangan unit usaha sebaiknya dilakukan secara selektif berdasarkan potensi lokal, kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya, dan peluang pasar sehingga risiko pengelolaan pada tahap awal dapat diminimalkan. Selain itu, diperlukan koordinasi yang berkelanjutan antara Pemerintah Desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat agar strategi pemberdayaan dapat dilaksanakan secara konsisten. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan evaluasi terhadap implementasi strategi tersebut setelah BUMDes menjalankan kegiatan usaha secara aktif, sehingga perubahan kinerja dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat dapat dianalisis secara lebih terukur.

REFERENSI

- Akbar, S., Khaidir, Supardi, Monalisa, & karto. (2022). Analisis Faktor Penghambat Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bina Usaha. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 20(3 SE-Articles), 261–272. <https://doi.org/10.46730/jiana.v20i3.8283>
- Anggraini, D. T. (2025). Antesenden Efektivitas Pengelolaan BUMDes di Indonesia. *Jambura Accounting Review*, 6(1 SE-Articles), 95–109. <https://doi.org/10.37905/jar.v6i1.151>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Musyayadah, R., Adi, K. R., & Idris, I. (2024). Peran BUMDes Desa Candiwates Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pasar Jande. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 8(2 SE-Articles), 570–578. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2024.008.02.13>
- Peraturan Pemerintah. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21.
- Sabon, C. F. W. S. wara, Kleden, M., & Lawalu, S. P. A. (2024). Strategi Keberlanjutan BUMDes Sebagai Upaya Pengelolaan Sumber Daya Yang Baik Di Desa Weranggere

- Kecamatan Witihamo Adonara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(3 SE-), 3110–3115. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3519>
- Saiman, S. B., & Hariyati, E. (2022). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Gunung Kecamatan Kota Komba. *Soetomo Administration Reform Review*, 1(4), 749–760.
- Saputra, A. M., & Samsahudi. (2025). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Syariah dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 22–39.
- Siregar, F. ahmad. (2023). Pengembangan Sistem Petanian Berkelanjutan Untuk Mencapai Keberlanjutan Pangan. *Jurnal Universitas Medan Area*, 1–11.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno, E., Kurniawansyah, K., & Syafruddin, S. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Lokal. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3 SE-Articles), 111–114. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/844
- Umar, N., Aneta, A., & Isa, R. (2025). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato. *Sosiologi Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4 SE-Artikel Penelitian), 229–240. <https://doi.org/10.37905/sjppm.v2i4.304>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).
- Wulandari, G. P. M., & Lestari, N. P. N. E. (2024). Transformasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Era Digital. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3), 263–281. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i3.3336>
- Yuliani, T., Anas, M., & Sugiono. (2025). Transformasi Pembelajaran Ekonomi: E-Modul Bermuatan Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Menengah Atas. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(1), 841–852. <https://doi.org/10.58230/27454312.1708>